

Aspek hukum eksekusi putusan pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 4 Agustus 2010 Nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010 = Legal aspect of an execution of a temporary termination ruling by the Notary Supervision Council : case study ruling of the Central Notary Supervision Council dated 4 August 2010 number 01/B/Mj.PPN/VIII/2010

Fernida Kristanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20349125&lokasi=lokal>

Abstrak

Di dalam lapangan hukum keperdataan, sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN. Tesis ini akan membahas mengenai aspek hukum eksekusi dari putusan pemberhentian sementara terhadap Notaris serta bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi eksekusi putusan pemberhentian sementara tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang Pelaksanaan eksekusi terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sanksi ini ditujukan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

Peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi eksekusi putusan tersebut adalah tidak efektif karena putusan tersebut dijatuhkan pada saat Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris tersebut telah memasuki usia pensiun. Seharusnya sebelum Majelis Pengawas Pusat Notaris mengambil keputusan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, maka Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengingatkan terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Pusat bahwa kondisi Notaris tersebut sudah memasuki usia pensiun, sehingga putusan yang diambil bisa optimal.

.....In civil law context, sanction is a punishment to force a person to fulfill an agreement or to obey with the provision of the law. A sanction given to a Notary is to enlighten him/her, that in carrying out the duty as a Notary, he/she duty violate the provisions on the implementation of Notarial duty as stated under UUJN.

This thesis will discuss about the legal aspect on the execution of a temporary termination of a Notary and the role of Notary Supervision Council in supervising the execution of the said temporary termination.

This analysis is a normative legal analysis with descriptive analysis type, intended to obtain understanding on the enforcement of the execution of the 3 months temporary termination sanction handed down by the Central Notary Supervision Council. The form of analysis is a prescriptive based on secondary data, consist of primary, secondary and third legal materials. The sanction is against the Notary who violates the UUJN and the Notary's code of ethic.

The role of Notary Supervision Council in supervising the execution of the ruling is not effective, because the ruling was handed down at the time the Notary who breach the UUJN and Notary's code of ethic has entering into his/her retirement age. Before the Central Notary Supervision Council issued the temporary termination sanction against the Notary who breached the provision of UUJN and Notary's code of ethic, the Regional Notary Supervision Council and the District Notary Supervision Council should have reminded the Central Notary Supervision Council that the said Notary has entered into his/her retirement age, so that any decision taken can be optimal.